
MASYARAKAT PASCA-KONFLIK : STUDI TRANSFORMASI KONFLIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Muliono^a, Dinda Syufradian Putra^b, Adeb Davega Prasna^c

^{a,b,c}Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: muliono@unja.ac.id, dinda8966@unja.ac.id, adeb.davega@unja.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mendiskusikan masyarakat pasca-konflik di Indonesia. Indonesia untuk beberapa dekade memiliki pengalaman konflik sosial bernuansa kekerasan yang cukup memprihatinkan. Studi tentang masyarakat pasca-konflik penting dikaji tidak saja diorientasikan pada kepentingan pemulihan dampak konflik kekerasan yang diakibatkan, tetapi juga didasarkan pada kesadaran adanya potensi konflik kekerasan dalam bentuk-bentuk baru. Hal ini berdampak pada sisi psikologis dan ekonomi-sosio-politik. Studi ini menunjukkan bahwa tantangan resolusi konflik di Indonesia pada masa pasca-konflik didasarkan oleh tiga hal yaitu pertama, sejarah konflik masa lalu. Kedua, karakter pluralistik masyarakat Indonesia dari segi suku, agama, ras dan golongan. Ketiga, konflik kekerasan dilatari oleh proses pelaksanaan demokrasi elektoral. Praktik demokrasi elektoral cenderung mendorong terjadi konflik kekerasan ketika isu dominan yang digunakan berkaitan politik identitas. Studi ini menyimpulkan bahwa masyarakat pasca-konflik membutuhkan pendekatan transformasi konflik melalui proses radikalisasi demokrasi. Dan, hal ini menuntut adanya paradigma pemberdayaan melalui pengembangan kelembagaan bersifat fungsional untuk mengorganisasi berbagai kebutuhan dan aspirasi publik pada aras lokal serta penguatan kapasitas masyarakat melalui proses demokratisasi.

Keywords: *Masyarakat Pasca-konflik, Transformasi Konflik, Demokrasi.*

POST-CONFLICT SOCIETIES: A STUDY OF CONFLICT TRANSFORMATION AND DEMOCRACY IN INDONESIA

ABSTRACT

This research discusses post-conflict societies in Indonesia. Indonesia has for several decades experienced social violent conflicts that are quite alarming. The study of post-conflict societies is important not only because it is oriented towards to recovery of the violent conflict implications but also because it is based on the awareness to the potency of conflicts in the new forms. However, this has psychological and socio-political impacts. This study shows that the challenges of conflict resolution in Indonesia in the post-conflict period are based on three things, namely first, the history of past conflicts. Second, the pluralistic character of Indonesian society in terms of ethnicity, religion, race and class. Third, violent conflict is triggered by the process of implementing electoral democracy. The implementation of electoral democracy tends to encourage violent conflict when the dominant issue that used is refer to political identity. This study concludes that post-conflict societies need a conflict transformation approach through a democratic radicalization process. And, this requires an empowerment paradigm through the development of local institution to organize various public needs and aspirations at the local level and strengthening community capacity through the democratization process.

Keywords: *Post-Conflict Society, Conflict Transformation, Democracy.*

LATARBELAKANG

Demokrasi oleh Habermas menekankan sebuah konsensus (Povitkina & Jagers, 2022). Sistem ini secara radikal berupaya membangun konsep untuk mengubah berbagai bentuk anta-gonisme menjadi agonisme melalui ruang-ruang deliberatif (Domann et al., 2023) yang kemudian memungkinkan terjadinya transformasi konflik. Konflik, bagaimanapun, terutama berdimensi kekerasan selalu bersifat kompleks dan destruktif. Sifat destruktif ini dapat terjadi secara berkelanjutan baik pada masa eskalasi konflik maupun pasca-konflik yang menunjukkan pola-pola pengulangan konflik yang telah terjadi.

Konflik dengan pola yang berulang menjadi kekhawatiran di banyak negara yang telah pernah mengalami konflik kekerasan. Pasca-konflik kekerasan berakhir, membangun masyarakat yang lebih stabil sering kali menjadi tantangan yang sulit diatasi (Mroß dan Fiedler, 2016). Kondisi latar belakang yang tidak baik, oleh karena konflik sebelumnya, memperkuat tantangan dan dorongan pada jebakan konflik yang dihadapi di banyak negara khususnya Indonesia. Indonesia secara sosiologis memiliki pengalaman konflik berdimensi kekerasan. Konflik ini menyebar di berbagai daerah dan menimbulkan dampak yang besar. Karakter konfliknya terjadi dua arah yaitu terhadap negara dan terhadap sesama masyarakat sipil melibatkan diferensiasi lintas golongan, etnis, ras, dan agama.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, konflik kekerasan ditandai dengan konflik antara masyarakat sipil versus rezim negara. Pada periode transisi demokrasi, konflik kekerasan terjadi secara diferensiatif antara komunalitas etnis, agama, ras, dan antar golongan masyarakat. Dampak konflik sosial ini cukup signifikan terhadap pengalaman kolektif masyarakat, baik terhadap hubungan antara sesama maupun terhadap negara.

Berbagai pendekatan resolusi konflik telah dilakukan (lihat Ali dan Panggabean, 2009; Arjon, 2018). Dan, Indonesia saat ini berada pada fase pasca-konflik (Lambang, 2001; Ansori, dkk., 2015). Masyarakat pasca-konflik didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat yang terjatuh dalam situasi konflik telah menghentikan permusuhan dan benturan fisik melalui proses negosiasi politik tertentu (Brown, 2011).

Berdasarkan fakta sosiologis, dalam mencapai kesepakatan damai, menunjukkan tidak senantiasa bahwa konflik yang telah terjadi berakhir secara keseluruhan. Kondisi masa konflik biasanya meninggalkan trauma. Konflik dan kekerasan juga cenderung muncul secara sporadis. Kasus di Sri Lanka (Meghan, dkk, 2001), Irlandia Utara (Brown, 2011), dan beberapa negara lain (Mroß dan Fiedler, 2016) memperkuat argumen bahwa masyarakat pasca-konflik memiliki kecenderungan yang tinggi untuk terjerebab kembali dalam konflik yang baru.

Dalam pendekatan resolusi konflik yang dilakukan, Indonesia menghadapi dinamika tantangan dan hambatan. Studi ini menemukan bahwa tantangan tersebut didasarkan pada tiga hal berikut. Pertama, sejarah konflik khususnya daerah dengan konflik berskala besar. Kedua, karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam dari hal kesukuan, agama, ras, dan golongan (Bertrand, 2004; Klinken, 2007; Jubba, 2019). Ketiga, implementasi demokrasi (SNPK, 2005-2013; Ansori, 2015) yang cenderung menimbulkan hasrat kekerasan terutama ketika berbagai isu dalam kontestasi politik yang digunakan berkaitan politik identitas. Masyarakat pasca-konflik membutuhkan pendekatan dan strategi khusus yang tidak hanya mencegah konflik tetapi juga mengkonsolidasikan perdamaian untuk mencapai kemajuan dan perdamaian yang berkelanjutan. Studi ini didesain untuk mendiskusikan masalah ini dengan

mengajukan model pendekatan transformasi konflik dan radikalisme demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui sistem data pemantauan kekerasan nasional Indonesia atau dataset sistem pemantauan kekerasan nasional (SNPK/NVMS), *UN-supported facilities for Indonesian recovery* (UNSFIR), program-program konflik dan pembangunan, laporan penelitian kolaboratif Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), dan The Asia Foundation (TAF), dan berbagai laporan dari media sosial mengenai konflik yang terjadi antara tahun 2016-2020. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan telaah atas konflik dan pola-pola kekerasan baru di Indonesia dari tahun 1997 hingga 2019. Pendekatan kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan analitis kritis terhadap fenomena konflik di Indonesia, dan menawarkan kemungkinan resolusi konflik melalui transformasi konflik dan radikalisme demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teoritis, ilmu-ilmu sosial mulai memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat pasca-konflik ketika berbagai fenomena konflik kekerasan dalam berbagai bentuknya terjadi pasca-konflik sosial mengalami deeskalasi. Kekerasan sosial yang muncul menarik ditelaah, karena kondisi tersebut cenderung menyamakan banyak hal di antara perbedaan konflik yang didasarkan pada penyebab utama konflik sebelumnya dengan kekerasan yang muncul kemudian seperti kekerasan melibatkan masyarakat tidak bersalah, berbagai bentuk premanisme (Hayner, 2010; Hynes, 2004) dan timbulnya masalah lain yang dihadapi masyarakat penyintas konflik seperti ekonomi, psikologis,

dan disintegrasi sosial (Alexander et al., 2004).

Konflik kekerasan lazim terjadi kembali pada masyarakat pasca-konflik. Banyak negara di dunia mengalami masalah ini (Mroß dan Fiedler, 2016). Indonesia termasuk di antaranya. Trauma, instabilitas ekonomi, sosial, dan politik adalah masalah yang kompleks dihadapi masyarakat pasca-konflik. Studi dilakukan Brown et al. (2011) menemukan bahwa masyarakat pasca-konflik, terutama mereka yang berada di negara berkembang, memiliki kemungkinan lebih besar terjerembab kembali dalam konflik. Hal ini disebabkan mereka penyintas konflik menghadapi proses pemulihan sosial dan ekonomi yang tidak sederhana. Ditambah lagi, mereka cenderung memiliki bekas konflik masa lalu yang memengaruhi aspek psikologis.

Masyarakat pasca-konflik ditandai dengan kondisi yang tidak stabil dan rentan untuk kembali terjerumus ke dalam konflik kekerasan serupa. Kondisi ini secara global dialami oleh banyak negara yang pernah mengalami konflik kekerasan khususnya sebagaimana disebut Brown dkk (2011) pada negara-negara yang memiliki masalah dalam hal ekonomi. Masyarakat seperti ini cenderung berjuang untuk memulihkan warisan konflik sosial yang dihadapi (Mroß dan Fiedler, 2016).

Masyarakat pasca-konflik masih cenderung mudah rapuh. Meskipun fenomena konflik mengalami deeskalasi namun kondisi fase ini memiliki probabilitas bahwa masih ada benih konflik yang mungkin tumbuh. Sisi laten dari konflik biasanya akan berfungsi mentrigasi munculnya kekerasan tambahan (Ericksson dan Wallenstein, 2004). Dan, tentu saja, keadaan seperti ini secara nyata menghambat berbagai upaya untuk mencapai konsensus dan stabilitas sosial (Darby, 2001).

Dinamika masyarakat pasca-konflik dapat mencakup beberapa fase seperti permusuhan (*hostility and revenge*) dan

tindak kekerasan (*violent*), perjanjian damai, demobilisasi, pelucutan senjata dan reintegrasi, pemulangan pengungsi yang menjadi penyintas konflik, pembentukan dan pengembangan institusi yang efektif, rekonsiliasi, integrasi masyarakat, dan pemulihan ekonomi (Brown et al., 2011). Berkaitan dengan ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam masyarakat pasca-konflik yaitu kondisi ekonomi, sistem politik dan kapasitas birokrasi, dan sistem keamanan masyarakat konflik. Setiap masyarakat yang telah mengalami konflik memiliki kebutuhan yang berbeda yang membutuhkan perhatian khusus masing-masing. Ketiga hal ini harus menjadi fokus kebijakan pasca-konflik yang dikenal dengan rekonstruksi dan pemulihan berkelanjutan.

Eksistensi demokrasi dalam masyarakat pasca-konflik tentu sangat signifikan. Demokrasi dapat membantu, atau sebagai katalisator, dalam proses pengembangan kelembagaan pasca-konflik, mencegah konflik muncul kembali dan menguatkan proses pembangunan perdamaian. Pada konteks ini terdapat relasi dalam mana demokrasi memainkan peran penting mengembangkan sistem kewaspadaan dan respon dini yang efektif untuk menghadapi potensi konflik baru yang mungkin terjadi atas berbagai perubahan dalam masyarakat.

1. Konflik Sosial di Indonesia

Studi ini mengklasifikasi konflik sosial di Indonesia menjadi tiga fase, fase rezim Orde Baru, fase awal menuju demokrasi (1997-2003), dan periode pasca reformasi (2004 hingga sekarang). Ketiga periode tersebut secara berbeda terjadi dan mengalami perubahan seiring dengan proses demokratisasi (Muliono, 2020). Pada masa Orde Baru, konflik sosial ditandai antara negara dan masyarakat sipil. Tindakan represi dari negara mendapat resistensi dengan reaksi gerakan separatis seperti Papua tahun 1964 hingga sampai saat ini, Aceh pada tahun 1976, dan Timor Timur tahun 1997. Menurut

Barron et al. (2014), gerakan separatis ini memicu konflik kekerasan dengan banyak korban. Timor Timur kemudian melepaskan diri dari Indonesia (pada Mei 2002) setelah berbagai konflik, dan Aceh mendapatkan penyelesaian konflik tahun 2005 (Asia Report, 2007; Fahmi, 2014).

Sementara konflik sosial setelah runtuhnya rezim Orde Baru ditandai dengan konflik komunal seperti suku, agama, ras, dan hubungan antar kelompok. Fase ini sangat menarik untuk diperhatikan karena 21.495 orang tewas dalam kurun waktu lima tahun (Barron et al., 2014). Di antara peristiwa tersebut, terdapat enam (enam) provinsi yang dianggap sebagai daerah konflik berskala tinggi dan berkelanjutan yaitu Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua (Bank Dunia, 2010). Di luar daerah-daerah tersebut, konflik kekerasan berskala besar juga terjadi di beberapa tempat seperti di Jakarta selama masa transisi demokrasi dan kerusuhan anti Tionghoa di Medan dan Solo (Purdey, 2006). Data tersebut menunjukkan bahwa dinamika konflik berwujud kekerasan sosial berbasis komunal terjadi di hampir semua daerah, meskipun ada tumpuan daerah konflik dan kekerasan berskala besar selama masa transisi demokrasi.

Kondisi kekerasan sosial yang meningkat, membuat Indonesia menjadi negara rentan terhadap disintegrasi seperti Yugoslavia (1990-2001) dan India (1947) (Emmerson, 2000; Aspinall & Berger, 2001). Konflik komunal di Yugoslavia dan India menyebabkan banyak korban dan memecah negara India. Pakistan dan India terpecah (Mittal & Ranjan, 2016), sedangkan di Yugoslavia terjadi genosida etnis (Çınar, 2019).

Konflik komunal dan separatisme adalah dua jenis konflik kekerasan sosial paling umum di Indonesia. Fakta ini menunjukkan kekhawatiran dan tantangan pluralisme di Indonesia, terutama berkaitan dengan gerakan

konservatisme dan politik identitas. Kemajemukan dari segi etnis, agama, ras, dan antar golongan akan dapat sewaktu-waktu menyebabkan perpecahan.

Pada lanskap demokrasi elektoral, tantangan kemajemukan ini mengalami penguatan. Berbagai data memperlihatkan setiap proses demokrasi, khususnya demokrasi elektoral, Indonesia dihadapkan dengan sejumlah konflik kekerasan. Konflik ini tidak saja terjadi pada sesama warga tetapi juga antara negara dan masyarakat yang secara praktis berbeda pilihan. Setiap masa demokrasi (demokrasi elektoral-transisi kekuasaan) di Indonesia rentan terhadap konflik. Narasi politik identitas berbasis SARA yang terus berkembang membuat guncangan ini semakin parah.

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK, 2015) mengumpulkan data tentang peristiwa dan dampak kekerasan antara tahun 2005 dan 2013. Data ini merujuk pada daerah-daerah yang pernah mengalami konflik kekerasan (SNPK, 2015). Data ini menarik dianalisa bahwa daerah dengan sejarah konflik ternyata memiliki tingkat konflik berkelanjutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai contoh Aceh dan Maluku (lihat Ansori et al., 2015). Dua daerah ini menunjukkan bahwa intensitas konflik menyebar dan menguat. Proses pilkada pasca-konflik di daerah tersebut mengidentifikasi perluasan warisan konflik sebelumnya.

Pada skala besar, konflik dan kekerasan periode demokrasi elektoral meningkat dari tahun 2014 hingga 2019. Salah satu kasusnya ialah kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI. Gesekan sosial karena kasus ini secara signifikan meningkatkan tensi dan berdampak pada adanya resistensi komunitas masyarakat Islam dalam skala luas. Lebih lanjut, anti-Tionghoa, komunisme, konflik agraria, dan separatisme adalah merupakan beberapa bentuk konflik dominan dari tahun 2016 hingga 2020. Selama pasca-

konflik, kekerasan sosial di Indonesia melibatkan masyarakat sipil, terutama Muslim yang terpinggirkan secara politik.

Proses demokratisasi di Indonesia dapat dikatakan belum memasuki fase ideal. Setiap peralihan kekuasaan melahirkan konflik kekerasan. Data YLBHI (2020), pada tahun 2019 menyebutkan aparatus negara adalah pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM paling tinggi kuantitasnya dalam menanggapi berbagai aspirasi politik masyarakat.

Berbagai realitas konflik ini penting diperhatikan. Ketika konflik tidak dapat diresolusi secara konstruktif, maka akan dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya eskalasi konflik berskala besar. Bagaimanapun, tingkat kekerasan yang tinggi dapat menjadi penanda adanya kemungkinan eskalasi konflik yang jauh lebih besar.

2. Transformasi konflik pada masyarakat pasca-konflik

Secara umum, pasca-konflik ditandai dengan berkurangnya berbagai kekerasan sosial di berbagai wilayah. Sebagian besar daerah konflik dengan intensitas tinggi telah menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dan melanjutkan proses pembangunan menuju demokrasi. Namun, sebagai masyarakat berpengalaman dalam konflik, Indonesia belum dapat steril dari potensi konflik kekerasan. Dan, dinamika konflik di atas dapat dilihat dari dua perspektif yaitu proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik dan perlunya pemahaman baru tentang konflik. Secara lebih komprehensif bahasan demokrasi akan diulas pada sub bagian berikutnya.

Pemahaman baru tentang konflik melihat konflik sebagai realitas natural dalam kehidupan masyarakat. Konflik tidak dapat dielaminir. Untuk itu, konflik perlu dikelola melalui proses transformasi konflik (Galtung, 1990; Fiedler dan Mroß, 2017). Untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat pasca-konflik, dibutuhkan strategi

transformatif untuk mencegah konflik kembali terjadi (Lambang, 2009).

Transformasi konflik merupakan proses yang melibatkan perubahan pola hubungan, kepentingan dan konstitusi yang menopang keberlanjutan konflik (Kriesberg, 2022). Termuat di sini perubahan hubungan, struktur sosial, dan perubahan keadaan yang menimbulkan konflik. Mentransformasi konflik dimaksudkan merubah konflik dari yang bersifat destruktif ke arah yang konstruktif (Jeong et al., 2008; Shukla, 2022). Pada masyarakat pasca-konflik pendekatan transformatif merupakan pendekatan rasional yang sangat mendasar untuk dijadikan kerangka mencegah kemungkinan kembali terjadinya konflik dan mengkonsolidasikan perdamaian secara berkelanjutan.

Transformasi konflik lebih mengarah pada proses perubahan sistemik, pembangunan perdamaian melalui struktur sosial dan budaya. Tujuan utamanya ialah mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas dengan cara mengubah kekuatan negatif konflik menjadi kekuatan sosial yang lebih positif (baca juga Coser dalam Ritzer, 2014). Dalam upaya transformasi konflik, beberapa aspek yang perlu dijadikan sebagai objek perubahan adalah sebagai berikut:

Pertama, aspek personal berupa perubahan kognitif, persepsi, emosi, hingga bahkan dimensi spiritual aktor terlibat. Kedua, aspek relasional berupa transformasi upaya untuk memperbaiki pola komunikasi serta interaksi antar aktor masyarakat yang bertikai. Ketiga, aspek kultural berupa proses mengidentifikasi aspek-aspek kebudayaan yang rentan dan nilai yang melegitimasi konflik. Aspek ini juga, dapat membantu mengatasi konflik melalui cara pengimplemntasian nilai-nilai kultural masyarakat lokal. Keempat, aspek struktural berupa transformasi berhubungan dengan struktur sosial. Melalui struktur sosial ini, masyarakat bisa mengelola serta membangun

hubungan yang baik antar masyarakat maupun terhadap pemerintah.

3. Radikalisasi demokrasi dalam membangun masyarakat pasca-konflik.

Diskursif masyarakat pasca-konflik di atas menegaskan bahwa konflik memiliki tautan terhadap akar sosial dan politik tertentu. Konflik sosial berada dalam konteks-konteks yang mensuasanakan konflik terjadi dan mengalami keberlanjutan. Konteks tersebut berupa rapuhnya sistem politik, masalah ketidakadilan, dan serta masalah ekonomi. Ke semua konteks ini merupakan dimensi bersifat sistemik. Proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan konflik-konflik ini terjadi dan cenderung sifatnya sangat kompleks. Demokrasi memiliki banyak perdebatan (August, 2024), tetapi pada esensinya demokrasi merupakan sistem yang memungkinkan adanya kebebasan dan kesetaraan. Untuk itu, masyarakat pasca-konflik memerlukan adanya radikalisasi demokrasi.

Berdasarkan Global Peace Index (2020) terdapat korelasi antara tingkat konflik kekerasan dan kesejahteraan suatu negara. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu negara, maka semakin rendah tingkat kekerasan sosialnya. Pada konteks Indonesia sebagai negara yang masih dalam proses berkembang, korelasi seperti ini dapat jelas ditemukan. Daerah rawan konflik merupakan daerah yang menghadapi masalah kesenjangan ekonomi. Sehingga secara psikologis, hasrat untuk melakukan kekerasan ketika ketidakadilan muncul menjadi dipandang rasional (Hardiman, 2002). Ini dapat dilihat pada kasus Papua. Secara sosiologis level kemiskinan di Papua cukup tinggi (Kompas, 2020) dan BKKBN (2019) mencatat daerah ini masuk ke dalam angka dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.

Bagaimana relasinya dengan demokrasi? Berbagai literatur mendiskusikan demokrasi

secara positif menjadi ruang membangun integrasi, perdamaian, dan kesejahteraan (Meyer, 2012; Doorenspleet, 2019). Lahirnya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus pada tingkat desa, misalnya, sebagaimana spirit UU Desa merupakan upaya membangun kesejahteraan melalui pengembangan aset-aset yang dimiliki dan pelayanan terhadap hak-hak dasar warga di tingkat lokal.

Radikalisasi demokrasi menciptakan struktur dan budaya politik yang mendukung perdamaian dengan mengedepankan partisipasi, akuntabilitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya dimaknai sebagai sistem pemerintahan, atau juga sebatas prosedural, tetapi juga fondasi bagi stabilitas dan harmoni dalam masyarakat.

Radikalisasi demokrasi dalam membangun masyarakat pasca-konflik di Indonesia dapat diimplementasikan dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, melalui partisipatif. Radikalisasi demokrasi memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan, yang dapat membantu mengurangi ketegangan, meningkatkan kesadaran tentang kepentingan bersama menciptakan kohesi sosial dan perdamaian. Kedua, menyadari pentingnya perbedaan sebagai bentuk kontestasi positif. Radikalisasi demokrasi memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan sudut pandang perspektif yang dapat membantu menemukan solusi yang lebih efektif dan inklusif terhadap masyarakat pasca-konflik.

Ketiga, kehadiran negara. Radikalisasi demokrasi mendorong adanya peran aktif pemerintah dalam mengatur serta mengelola konflik, memastikan bahwa hak-hak aktor dan kelompok pada masyarakat pasca-konflik terjamin. Keempat, hadirnya kelembagaan. demokrasi membuka ruang adanya peran aktif kelembagaan berwenang dalam mentransformasi konflik dan membangun

perdamaian, seperti pengadilan dan lembaga penegakan hukum baik secara formal maupun non-formal seperti kelembagaan adat masyarakat lokal penyintas konflik. Dengan pengimplementasian hal ini demokrasi dapat membuka ruang baru di masyarakat serta mengurangi konflik, mentransformasinya, dan serta meningkatkan stabilitas sosial dan politik.

Radikalisasi demokrasi membantu dalam mengubah cara pandang atau perspektif melakukan pendekatan dalam membangun perdamaian dalam masyarakat pasca-konflik. Jika, ada kecenderungan konflik di Indonesia sering diselesaikan melalui cara operasi aparatus negara, radikalisasi demokrasi, akan lebih kepada meningkatkan peran dialog, melakukan konsensus, secara damai dan pemulihan masyarakat pasca-konflik secara bermartabat. Bermartabat yang dimaksud, aktor dalam masyarakat pasca-konflik ditempatkan sebagai subjek dari pembangunan demokrasi dan perdamaian bukan sebagai objek. Proses dialogis dan perundingan dalam masyarakat, serta adanya kehadiran peran aktif pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang di masyarakat.

Radikalisasi demokrasi juga memungkinkan adanya peran aktif masyarakat dalam proses transformasi konflik. Partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyelesaian konflik dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui representatif di ruang publik. Dengan demikian, demokrasi dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan kesepakatan tentang kepentingan bersama, meningkatkan stabilitas sosial dan sistem politik hingga sampai pada aras lokal. Dalam suatu sintesanya, radikalisasi demokrasi memungkinkan adanya peran aktif masyarakat, pemerintah, dan berbagai kelembagaan formal dan informal dalam mengatur dan mengelola konflik, serta

memastikan bahwa berbagai hak-hak masyarakat dapat terlindungi.

KESIMPULAN

Demokrasi memainkan peran fundamental dalam masyarakat konflik. Proses penyelesaian konflik berupa transformasi konflik dapat terimplementasi dengan baik ketika iklim demokrasi yang baik tersedia. Demokrasi dan transformasi konflik, dua konsep yang terkait dalam analisis konflik politik dan sosial. Demokrasi, dalam konteks ini, merujuk pada sistem berbasis pada prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi. Transformasi konflik, pada sisi lain, mengacu pada proses mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan destruktif dari konflik menjadi kekuatan yang konstruktif.

Radikalisasi demokrasi merupakan bentuk implementasi nilai demokrasi yang bukan hanya sekedar pada prosedural semata, tetapi lebih kepada nilai substantif demokrasi. Masyarakat pasca-konflik secara sosiologis memerlukan atmosfer demokrasi dan gerakan transformatif dari konflik yang telah dialami untuk mencapai pemulihan dan stabilitas sosial yang memadai.

Masyarakat pasca-konflik sendiri, secara teoritis, mendapat perhatian khusus dalam kajian ilmu-ilmu sosial didasarkan pada adanya fenomena kekerasan baru yang secara simultan dapat merembes pada berbagai tindakan premanisme dan keterlibatan orang-orang yang tidak bersalah (Hayner, 2010; Hynes, 2004), memiliki dampak sosial, ekonomi, dan bahkan psikologis.

Untuk itu, dalam studi ini ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam masyarakat pasca-konflik, yaitu potensi dan kondisi ekonomi, sistem politik, dan kapasitas birokrasi atau kelembagaan. Berbagai kebijakan pasca-konflik dalam kaitannya dengan ketiga hal tersebut harus berorientasi pada proses perwujudan rekonstruksi,

mendorong pemulihan berkelanjutan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik baru dan kekerasan sosial yang berulang.

Studi ini juga menyimpulkan dalam dalam masa pasca-konflik, Indonesia mengalami metamorfosa menjadi suatu tatanan sosial dengan karakter yang baru. Konflik dan kekerasan sosial di Indonesia pada masa pasca-konflik diwarnai oleh konflik demokrasi elektoral. Dan, pola-pola penyaluran konflik pada sebagian kasus cenderung bertransformasi menjadi cara-cara damai, seperti dalam bentuk protes dan demonstrasi, meskipun pada titik-titik tertentu konflik dengan kekerasan masih terjadi. Namun pada masyarakat lokal cara yang konstruktif lebih menjadi pilihan.

Pasca-konflik di Indonesia bukan berarti konflik dan kekerasan sosial di masyarakat telah berakhir sepenuhnya. Namun, masyarakat Indonesia masih tetap berada dalam berbagai gesekan sosial baik dengan negara maupun dengan antar sesama kelompok masyarakat. Penelitian ini menekankan pembangunan masyarakat pasca-konflik melalui proses transformasi konflik dan radikalisasi demokrasi secara berkelanjutan yang mengandaikan adanya interkoneksi seimbang antara berbagai aspek kehidupan yang ditujukan memanusiaikan manusia, peka terhadap lingkungan, dan mengantisipasi sejak dini kemungkinan konflik kekerasan yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, J., Eyerman, R., Giesen, B., Smelser, N. & Sztompka, P. (2004). *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkeley: University of California Press.
- Ali-Fauzi, I., Alam, R. H., & Panggabean, S. R. (2009). *Pola-pola konflik keagamaan di Indonesia, 1990-2008*.
- Anan, Kofi. (2002). *Prevention of Armed Conflict: Report of the Secretary General*. New York: United Nation.

- Ansori, Muhammad Hasan., Putra, R. Praditya Andika., Efendi, Johari,... Hutagalung, Vidya. (2015). *Post-Conflict Democracy, Violence, and Peace-Building in Aceh and Maluku*. Jakarta: The Habibie Center, National Violence Monitoring System (SNPK)
- Arjon, Sugit. 2018. Conflict Management in Indonesia: Policy Perspective and Analysis. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanitirs*, 8(1), 2-9.
- Arnani, Mela. (2020). Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Provinsi. Diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>
- Asia Report. (2007). *Aceh : Komplikasi Paska Konflik*.
- Aspinall, E., & Berger, M. T. (2001). The break-up of Indonesia? Nationalisms after Decolonisation and the Limits of the Nation-state in Post-cold war Southeast Asia.
- Barron, P., Jaffrey, S., & Varshney, A. (2014). *How Large Conflicts Subside: Evidence from Indonesia* (Indonesian). The World Bank.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bina, Olivia. (2013). The green economy and sustainable development: an uneasy balance? *Environment and Planning. Government and Policy*, 31, 1023–1047.
- BkkBN. (2019). Bkkbn Siapkan Rp1,3 Miliar Untuk Cegah Stunting di Papua. Diakses pada <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-siapkan-rp1-3-miliar-untuk-cegah-stunting-di-papua>
- Brown, Graham., Langer, Arnim & Stewar, Frances. (2011). A Typology of Post-Conflict Environments. *Centre for Research On Peace and Development (CRPD) Working Paper*, 1.
- Darby, J. (2001) *The Effects of Violence on Peace Processes*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Ericksson, M. & Wallensteen, P. (2004). Armed Conflict, 1989-2003. *Journal of Peace Research*, 41, 625-36.
- Fahmi, C. (2014). *Jejak Konflik Baru di Aceh: Pemetaan Jenis & Sumber Konflik Politik, Hukum, Sumber Daya Alam, Agama, Etnis dan Ekonomi*. Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh.
- Fiedler, Charlotte & Mroß, Karina. (2017). Post-Conflict Societies: Chances for Peace and Types of International Support. *Briefing Paper*, 4.
- Galtung, Johan. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- Galtung, Johan. (1996). *Peace by Peaceful Means, Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: PRIO, SAGE Publications.
- Global Peace Index. (2020). Diakses pada <http://statisticstimes.com/ranking/global-peace-index.php>.
- Hayner, P. (2010) *Unspeakable Truths*. 2nd Edition. Cambridge: Polity Press.
- Hynes, H.P. (2004). On the Battlefield of Women's Bodies. *Women's Studies International Forum*, 27, 431-45.
- Jubba, Hasse. (2019). *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Klinken, Gerry van. (2007). *Communal Violence and Democratization in Indonesia Small town wars*. London and New York. Routledge Taylor & Francis Group.
- Lambang, Trijono. (2009). Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 48-70

- Martz E. (2010). "Introduction to Trauma Rehabilitation After War and Conflict". In: Martz E. (eds) *Trauma Rehabilitation After War and Conflict*. New York: Springer https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5722-1_1.
- McLaughlin, Karrie & Perdana, Ari. (2010). Conflict and Dispute Resolution in Indonesia: Information from the 2006 Governance and Decentralization Survey. *Indonesian Social Development Paper*, (16) 01.
- Meghan, O'Sullivan., et al.. (2001). Sri Lanka: Civil Strife, Civil Society, and the State 1983-1995. *War and Underdevelopment*, 2, 176-219.
- Mendeloff, David. (2009). Trauma and Vengeance: Assessing the Psychological and Emotional Effects of Post-Conflict Justice. *Human Rights Quarterly*, 31(3), 592-623.
- Mittal, D., & Ranjan, A. (2016). India-Pakistan: Contours of Relationship. *Space and Culture, India*, 4(1), 6–18. <https://doi.org/10.20896/saci.v4i1.192>
- Muliono. (2020). Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia. *Al-Adyan, Journal of Religious Studies*, 1(2), 116-132.
- MSR/Multi-Stakeholder Review of Post-Conflict Programming in Aceh: Identifying the Foundations for Sustainable Peace and Development in Aceh. (2009).
- Purdey, J. (2006). *Anti-Chinese Violence in Indonesia, 1996–199*. Singapore University Press.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group.
- Silove, Derrick., Liddell, Belinda., Rees, Susan., Chey, Tien., ...et al. (2014). Effects of recurrent violence on post-traumatic stress disorder and severe distress in conflict-affected Timor-Leste: a 6-year longitudinal study. *The Lancet Global Health*, (2)5, 293-300.
- National violence monitoring system dataset/SNPK*. (2015).
- World Bank. (2010). *Pola-pola Baru Kekerasan di Indonesia: Data Awal dari Enam Provinsi dengan Pengalaman Berskala Tinggi*.
- YLBHI. (2020). *Reformasi Dikorupsi Oligarki. Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019*